NEWSLETTER

APBNKiTA

KINERJA DAN FAKTA | APRIL | 2026



APBN SOLID DAN BERDAYA TAHAN,
Mendorong Pertumbuhan, Meredam Gejolak

Foto: Pexels-Angke Widya

#KATAMENTERIKITA

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa reformasi yang telah dilakukan mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Pemerintah akan terus menjaga momentum ini dengan memantau perkembangan ekonomi secara cermat, merespons setiap tantangan, dan memastikan investasi tetap diarahkan untuk mendorong laju pertumbuhan.



Ketika Selat Hormuz Tertutup:

Di Tengah Eskalasi Gejolak Global, Indonesia Lebih Tahan dari yang Dikhawatirkan



Tahun 2026 bahkan belum genap satu triwulan ketika ketegangan geopolitik global kembali meningkat tajam. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran yang menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur energi, serta sejumlah lokasi strategis lainnya. Respons Iran yang menyasar pangkalan AS di kawasan Teluk mendorong eskalasi yang berlangsung cepat. Perkembangan ini meningkatkan kewaspadaan global, terutama karena kawasan tersebut merupakan jalur distribusi energi strategis dunia.

Yang dikhawatirkan pun akhirnya terjadi. Iran menutup Selat Hormuz pada 5 Maret 2026. Selat selebar 33 kilometer itu merupakan urat nadi perdagangan energi global, yang dilalui oleh 20% minyak mentah, 29% LPG, dan 19% LNG setiap harinya. Jalur ini menjadi rute utama ekspor energi dari negara-negara Teluk Persia menuju pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Selama lebih dari sebulan, ketidakpastian global meningkat tajam. Tekanan terus mengalir dari berbagai penjuru — pasar bergejolak, rantai pasok tersendat, dan forum-forum internasional terus mengupayakan solusi. Hingga pada 8 April 2026, AS dan Iran akhirnya menyepakati gencatan senjata sementara selama dua minggu, dengan syarat Selat Hormuz dibuka kembali.

Pasar merespon gencatan senjata dengan cepat. Harga minyak turun sekitar 13-17% dalam hitungan jam setelah pengumuman. IHSG dibuka di zona hijau, menguat lebih dari 100 poin pada hari yang sama. Indeks saham Amerika juga menguat, dengan peningkatan 3,4% pada S&P 500, serta kenaikan lebih dari 1.200 poin pada indeks Dow Jones. Namun, jalur diplomasi belum sepenuhnya berjalan mulus. Pada 12–14 April 2026, delegasi AS dan Iran bertemu di Islamabad selama lebih dari 21 jam tanpa membuahkan hasil. Iran menolak syarat AS terkait pembekuan program rudal balistik, sementara AS menolak mencabut sanksi.

Ketika batas waktu gencatan dua minggu mendekati akhir pada 22 April 2026, situasi kembali memanas. Iran menyita dua kapal kontainer di Selat Hormuz, sementara AS mempertahankan blokade lautnya terhadap pelabuhan Iran. Pada hari yang sama, Presiden Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata hingga Iran dapat menyusun proposal perdamaian yang lebih utuh. Namun, arah menuju perdamaian masih sangat sulit diprediksi. Negosiasi lanjutan masih terbuka, meskipun jalannya diperkirakan tidak akan mudah.

Seluruh Dunia Terdampak

Guncangan yang ditimbulkan tak hanya berdampak pada Kawasan Timur Tengah. Begitu Selat Hormuz tertutup, harga minyak mentah Brent yang sebelumnya di kisaran USD70 per barel melonjak hingga sempat menyentuh USD118 per barel. Premi asuransi kapal tanker naik dua kali lipat, biaya pengiriman meningkat tajam, dan sekitar 320 kapal energi tertahan di Teluk Persia. Akibatnya, rantai pasok global yang sebelumnya sudah tertekan menjadi semakin terganggu sehingga mendorong kenaikan biaya produksi, memicu kelangkaan bahan baku, dan memperkuat tekanan inflasi di berbagai belahan dunia.

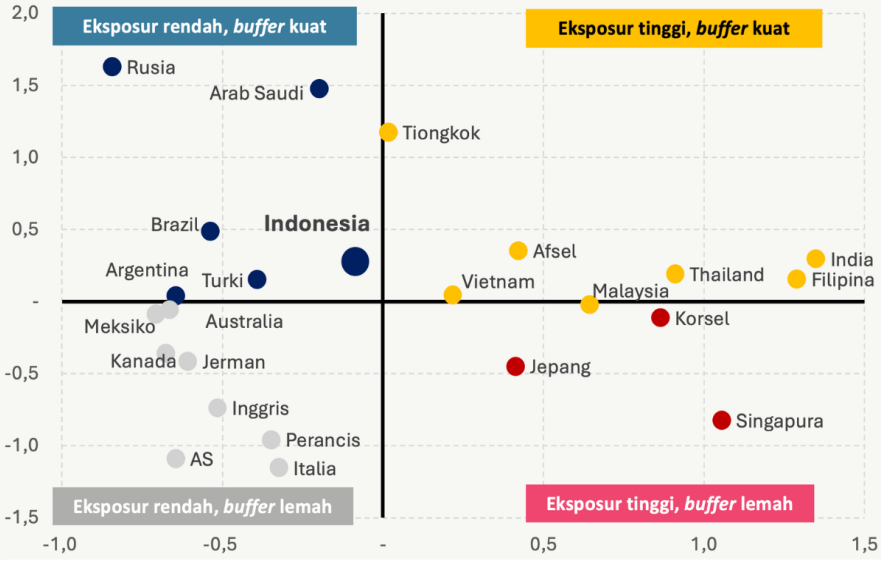
Di tengah kondisi tersebut, prospek ekonomi dunia semakin tertekan. IMF memproyeksikan pertumbuhan global 2026 hanya 3,1% (yoy), sementara Bank Dunia lebih pesimistis di angka 2,6% (yoy). Kenaikan harga energi mempersempit ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter. Akibatnya, penurunan suku bunga cenderung tertahan, sehingga berpotensi menahan aktivitas produksi dan investasi.

Dampak konflik di Timur Tengah dirasakan oleh berbagai negara, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Jepang termasuk yang paling rentan, dengan lebih dari 90% impor minyaknya melewati Selat Hormuz. Korea Selatan tak jauh berbeda, dengan sekitar 70% pasokan minyaknya bergantung pada jalur yang sama. Singapura, sebagai pusat perdagangan dan

logistik regional, menghadapi berbagai macam tekanan dari lonjakan biaya pengiriman dan pelemahan sentimen bisnis. Sementara itu, Tailan menanggung beban ganda, yaitu biaya impor yang makin mahal sekaligus keluarnya aliran modal asing sehingga melemahkan nilai tukar dan mengganggu stabilitas pasar.

Indonesia juga merasakan dampak eskalasi konflik geopolitik. Namun, fundamental ekonomi yang solid menjadikan Indonesia lebih resilien dibandingkan banyak negara lainnya. Berdasarkan indikator ketahanan ekonomi yang dipublikasikan The Economist, Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan eksposur relatif rendah dan *buffer* yang memadai.

Ketahanan Indonesia atas Tekanan Gangguan Energi Global
Relatif Kuat di G20-ASEAN
Sumber: metodologi the Economist, CEIC, TradeMap, World Bank (diolah)



Transmisi Gejolak ke Indonesia

Dampak gejolak global akibat eskalasi geopolitik turut menjalar ke perekonomian Indonesia. Transmisi paling awal terjadi melalui pergerakan harga energi, terutama minyak mentah. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik hanya 600 ribu barel. Akibatnya, sekitar 1 juta barel harus dipenuhi dari impor, di mana 31% pasokan minyak Indonesia melewati Selat Hormuz. Ketika harga minyak global meningkat jauh di atas asumsi APBN, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi ikut meningkat.

Namun di sisi lain, Indonesia juga merupakan eksportir komoditas yang harganya cenderung meningkat seiring kenaikan harga energi global. Harga batu bara menguat 24,6% sejak awal tahun. Kenaikan juga terjadi pada harga komoditas lain seperti tembaga, nikel, dan CPO yang masing-masing tumbuh 4,6%, 16,3%, dan 17,1% (ytd). Hal ini mendorong pertumbuhan pendapatan negara sehingga dapat mengimbangi sebagian tekanan pada belanja subsidi dan kompensasi energi.

Ketahanan sektor eksternal menjadi salah satu penopang resiliensi Indonesia, didukung surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026. Ekspor sepanjang Triwulan I 2026 tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan daya saing yang tetap terjaga. Dalam periode yang sama, impor tumbuh 10,05%, didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal, yang mengindikasikan berlanjutnya ekspansi produksi dan investasi.

Gejolak global sempat tercermin pula pada pergerakan Rupiah, *yield* SBN 10 tahun, dan IHSG, seiring kecenderungan investor global beralih ke aset yang lebih aman. Namun, memasuki akhir April, kondisi mulai membaik. *Yield* SBN 10 tahun melandai ke 6,45% (ytd) per 28 April 2026, mencerminkan tekanan yang berangsur mereda. Aliran modal ke Indonesia tetap terjaga dengan *net inflow* Rp10,4 triliun hingga akhir April 2026 — jauh berbeda dengan Tailan dan Singapura yang justru mencatat *net outflow* cukup dalam. Hal ini merefleksikan keyakinan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia yang masih solid.

Dampak gejolak global juga terasa melalui penyesuaian harga. Harga BBM non-subsidi mengalami penyesuaian, sementara komoditas berbasis petrokimia seperti plastik, bahan baku tekstil, dan pupuk ikut terkerek, diiringi biaya logistik dan avtur yang naik signifikan. Tekanan ini berpotensi mendorong *imported inflation* dan menahan sebagian daya beli masyarakat.

Meski demikian, inflasi Indonesia per April 2026 masih terkendali sebesar 2,42%, jauh di bawah lonjakan yang dialami negara dengan eksposur lebih tinggi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi domestik mampu menyerap tekanan dari gangguan rantai pasok global akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Ketidakpastian akibat tensi geopolitik belum sepenuhnya sirna. Langkah mitigasi diperkuat dengan mendiversifikasi sumber impor minyak dari Afrika, Amerika, hingga Asia Tengah, serta memastikan stok BBM dan LPG domestik tetap aman. Pemerintah terus memantau perkembangan dan menjaga komunikasi aktif dengan investor, serta memastikan APBN tetap berperan sebagai *shock absorber* untuk meredam dampak gejolak terhadap masyarakat.


Foto: Pexels-Jeffry Surianto

Fondasi Kuat di Tengah Gejolak

Indikator Membaik, Tekanan Mereda, dan Aktivitas Ekonomi Tetap Tumbuh

Badai belum sepenuhnya berlalu — tetapi ekonomi Indonesia berdiri lebih kokoh dari yang banyak dikhawatirkan. Sejumlah indikator domestik justru mencerminkan kondisi yang tetap solid, meskipun harga energi global dan volatilitas pasar keuangan mewarnai awal 2026

Di tengah dinamika harga minyak global, kapasitas domestik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Harga minyak Brent yang sempat melampaui USD118 per barel kini telah turun ke kisaran USD100 per barel, dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) relatif terjaga di level USD78,5 per barel (realisasi Maret) dan USD83,8 per barel (perkiraan April). Per Februari 2026, lifting minyak dan gas terjaga masing-masing sebesar 535,8 ribu barel per hari (MK dan NGL) dan 957,9 ribu barel (tidak termasuk NGL). Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan energi dan akan terus dioptimalkan di tengah kondisi pasar komoditas yang masih bergejolak.

Sinyal perbaikan juga terlihat di pasar keuangan domestik. Rupiah berada di level Rp17.324 (eop) atau Rp16.933 (ytd) per 30 April. Pelemahan ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan dinamika moneter global, namun masih relatif moderat dibandingkan negara lainnya.

Sementara itu, *yield* SBN 10 tahun per 28 April tercatat 6,76% (eop) atau 6,45% (ytd), meningkat dari awal tahun namun pergerakannya tetap terkendali. *Spread* SBN Rupiah terhadap US Treasury per 4 Mei juga bertahan di sekitar 237 bps, lebih baik dari Brasil (956 bps), India (263 bps), dan Meksiko (482 bps), sementara *spread* SBN Valas hanya 85 bps, merefleksikan *currency risk* dan *country risk* yang masih *manageable*, bahkan sedikit menguat dibanding awal tahun. Seiring meredanya sentimen *risk-off*, aliran modal pada bulan April mencatatkan *net inflow* sebesar Rp38,5 triliun, (SBN *inflow* Rp13,4 triliun, SRBI *inflow* Rp42,2 triliun, sementara saham masih mencatat *outflow*).

Inflasi terkendali dalam rentang sasaran. Realisasi Maret 2026 tercatat 3,48% (yoy), dipengaruhi efek *baseline* dari berakhirnya diskon tarif listrik awal 2025 yang mendorong lonjakan komponen *administered prices*. Tekanan harga pangan juga terkendali, tergambar dari penurunan inflasi *volatile food* menjadi 4,24% (yoy) seiring stabilnya harga selama Ramadan dan Idulfitri. Inflasi inti juga relatif stabil di 2,52% (yoy), mencerminkan permintaan domestik yang tetap solid.

Seiring meredanya efek *baseline* tersebut, inflasi kembali menurun menjadi 2,42% (yoy) pada April 2026. Perbaikan ini juga diikuti oleh semakin melandainya inflasi *volatile food*, penurunan tekanan *administered prices*, serta inflasi inti yang tetap terjaga. Di tengah kenaikan harga energi global, perkembangan ini mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan dan intervensi yang terukur, termasuk dari sisi penguatan cadangan pangan Pemerintah.

Ekonomi Domestik Tumbuh Kuat, Momentum Terus Terjaga



Indonesia membuka 2026 dengan pijakan yang kuat. PDB Triwulan I tumbuh 5,61% secara tahunan, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2025 (4,87%) maupun Triwulan IV 2025 (5,39%). Artinya, denyut ekonomi domestik bergerak lebih cepat ditopang oleh konsumsi yang tetap terjaga dan investasi yang terus tumbuh, sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah dan momen hari besar keagamaan.

Tumbuh Positif di Semua Wilayah

Kabar baiknya, pertumbuhan ini berlangsung lebih merata. Seluruh wilayah Indonesia mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan I 2026, dengan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi tumbuh di atas laju nasional.

Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi (7,93% yoy), ditopang lonjakan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mendorong aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat secara luas. Jawa, sebagai penyumbang terbesar ekonomi nasional (57,24% distribusi), tumbuh solid sebesar 5,79% (yoy). Sulawesi mencatat 5,96% (yoy), sementara wilayah lain juga terus bergerak sesuai karakter sektoral masing-masing.

> *Komponen penyusun ekonomi kita masih berfungsi dengan baik. Kita jalankan kebijakan seoptimal mungkin supaya bisa menuju ke arah 6% tahun ini.*
>
> Purbaya Yudhi Sadewa
> (Menteri Keuangan RI)

Produksi Menguat, Aktivitas Ekonomi Meluas

Lapangan usaha utama mencatatkan pertumbuhan positif, menggambarkan aktivitas ekonomi yang tetap kuat di tengah dinamika global. Industri pengolahan tetap menjadi penopang utama (kontribusi 19,07%), tumbuh 5,04% (yoy) didorong permintaan domestik seiring momentum Ramadan dan Idulfitri, serta permintaan ekspor komoditas olahan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 13,14% (yoy), didorong peningkatan aktivitas pariwisata, mobilitas masyarakat, dan perluasan program MBG. Transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% (yoy) seiring lonjakan mobilitas masyarakat. Perdagangan tumbuh 6,26% (yoy), sejalan dengan peningkatan produksi barang domestik, konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, serta meningkatnya tren belanja *online*.

Konstruksi tumbuh 5,49% (yoy), mengindikasikan berlanjutnya pembangunan infrastruktur sejalan dengan akselerasi belanja modal pemerintah. Pertanian juga mencatat peningkatan sebesar 4,97% (yoy) ditopang panen raya padi dan lonjakan permintaan daging ayam serta telur. Sementara itu, Pertambangan masih terkontraksi 2,14% (yoy) seiring tekanan harga komoditas global yang belum sepenuhnya pulih.

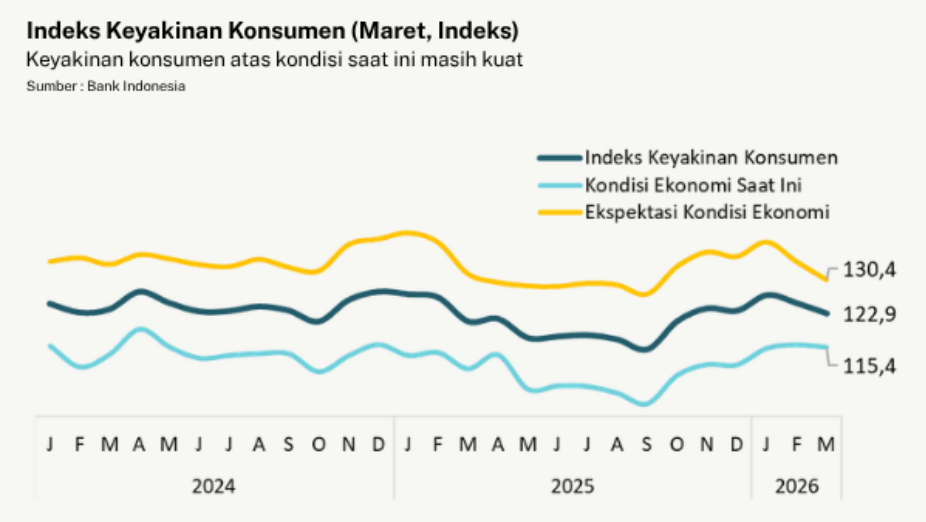
Daya Beli Terjaga, Investasi Tetap Berjalan

Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 5,52% (yoy). Momentum Ramadan, Idulfitri, libur nasional, serta pembayaran THR bagi ASN/TNI/Polri, pensiunan, dan pekerja swasta menjadi faktor yang menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Peran APBN juga terlihat jelas melalui konsumsi Pemerintah yang tumbuh tinggi 21,81% (yoy), didorong pembayaran belanja pegawai, THR, pengangkatan ASN baru, serta belanja barang dan jasa, termasuk belanja yang langsung dirasakan masyarakat melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan perbaikan pola belanja Pemerintah yang selama ini terkonsentrasi di Triwulan IV.

Investasi juga tetap berjalan sebagai motor pertumbuhan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96% (yoy), didukung peningkatan impor barang modal, realisasi PMDN dan PMA, serta belanja modal pemerintah yang tumbuh kuat

Sementara itu, ekspor tumbuh moderat 0,90% (yoy). Komoditas andalan seperti CPO, baterai, dan produk elektronik masih memberi kontribusi positif, meski tertahan oleh fragmentasi geopolitik dan tren proteksionisme.



Sektor Riil Terus Bergerak: Konsumsi Terjaga, Optimisme Menguat

Resiliensi perekonomian Indonesia dalam menghadapi guncangan juga terlihat dari aktivitas ekonomi yang tetap terjaga positif. Di sektor produksi, PMI Manufaktur Indonesia tercatat 50,1 pada Maret 2026, sejalan dengan 79% negara G20 dan ASEAN-6 lainnya yang bertahan di zona positif, mengindikasikan optimisme dunia usaha terhadap prospek pertumbuhan sektor manufaktur yang masih akan terus bertumbuh.

Dari sisi konsumsi, *Mandiri Spending Index* (MSI) mencapai 425,8, didorong lonjakan belanja menjelang lebaran di segmen *consumer goods*, *electronic*, *leisures*, dan *mobility*, sebelum kemudian termoderasi secara alami pasca-Idulfitri. Sementara itu, indeks penjualan ritel Maret tumbuh 2,4% (yoy), terutama ditopang oleh kelompok suku cadang, makanan-minuman, serta budaya dan rekreasi.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada pada level kuat sebesar 122,9. Keyakinan ini terutama ditopang oleh ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan yang mencapai 130,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memandang prospek ekonomi secara positif meskipun dinamika dan tantangan saat ini masih perlu diwaspadai.

Aktivitas ekonomi yang positif juga tercermin dari konsumsi listrik yang mengalami *rebound*, tumbuh 2,1% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan konsumsi listrik industri (+6,6% yoy) dan bisnis (+3,7% yoy), yang merefleksikan ekspansi aktivitas produksi. Sementara itu, konsumsi listrik rumah tangga mengalami moderasi menjadi 2,6% (yoy) seiring normalisasi pasca-periode diskon.

Ketidakpastian global memang belum sepenuhnya sirna. Namun, dengan fondasi ekonomi yang kuat dan respons kebijakan yang adaptif, Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak hanya bertahan — tetapi juga memanfaatkan celah peluang yang masih terbuka. Di balik semua itu, APBN terus bekerja sebagai peredam guncangan, memastikan bahwa guncangan yang terjadi tidak menjalar sampai ke dapur rakyat.

REALISASI INDIKATOR EKONOMI DIBANDINGKAN ASUMSI APBN 2026

Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,4%	**5,61%** Triwulan I 2026
Inflasi (yoy)	2,5%	**2,42%** April 2026
Nilai Tukar	Rp16.500/USD	**Rp16.933/USD (ytd)** **Rp17.324/USD (eop)** 30 April 2026
Yield SBN 10 Tahun	6,9%	**6,45% (ytd)** **6,76% (eop)** 28 April 2026
Harga Minyak Mentah (ytd)	USD70/barel	**USD78,5/barel** Maret 2026 **USD83,8 barel** April 2026 (Estimasi)
Lifting Minyak (barel/hari)	610 ribu	**535,8 ribu** Februari 2026
Lifting Gas (barel setara minyak/hari)	984 ribu	**957,9 ribu** Februari 2026

Sumber : Kemenkeu, BI, BPS, SKK Migas/ESDM


Foto: Badan Gizi Nasional

Pertumbuhan Solid, Pasar Tenaga Kerja Ikut Membaik

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas angka, namun juga berdampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja.

Per Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah 1,896 juta orang dibanding Februari 2025. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,76% menjadi 4,68%, dengan jumlah pengangguran berkurang menjadi 7,24 juta orang, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Penyerapan tenaga kerja terbesar masih berada pada sektor Pertanian (28,78%), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran (17,95%) serta Industri Pengolahan (13,57%). Artinya, sekitar enam dari sepuluh pekerja di Indonesia bekerja di tiga sektor utama tersebut—sektor yang pada saat yang sama juga menjadi penopang penting pertumbuhan produksi pada Triwulan I 2026. Sektor Akomodasi dan Makan Minum juga menyerap 7,90% tenaga kerja seiring pelaksanaan program MBG yang mendorong pembukaan ribuan titik SPPG baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Realisasi APBN hingga 31 Maret 2026

URAIAN (dalam Triliun Rupiah)	2025		2026		
	APBN	Realisasi Maret	APBN	Realisasi Maret	% thd APBN
PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	520,4	3.153,6	**574,9**	18,2
PENERIMAAN PERPAJAKAN	2.490,9	404,7	2.693,7	462,7	17,2
Penerimaan Pajak	2.189,3	327,0	2.357,7	394,8	16,7
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301,6	77,6	336,0	67,9	20,2
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	513,6	115,6	459,2	112,1	24,4
PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,1	0,7	0,1	17,2
BELANJA NEGARA	3.621,3	620,3	3.842,7	**815,0**	21,2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.701,4	413,2	3.149,7	610,3	19,4
Belanja K/L	1.160,1	196,1	1.510,5	281,2	18,6
Belanja non-K/L	1,541,4	217,2	1.639,2	329,1	20,1
TRANSFER KE DAERAH	919,9	207,1	693,0	204,8	29,5
KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	21,9	(89,7)	**(95,8)**	106,8
DEFISIT ANGGARAN	(616,2)	(99,8)	(689,1)	**(240,1)**	34,8
% Defisit terhadap PDB	(2,53)	(0,41)	(2,68)	(0,93)	
PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	252,5	689,1	**257,4**	37,3

APBN Didesain Ekspansif

Menjaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian

Di balik angka yang membaik, inflasi yang terkendali, dan kredibilitas yang terjaga, ada APBN yang terus memainkan peran sebagai jangkar utama stabilitas. APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen alokasi anggaran, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang dirancang untuk bersifat ekspansif dan countercyclical dalam mendorong pertumbuhan, melindungi kelompok rentan, serta meredam guncangan sebelum dampaknya terasa oleh masyarakat.

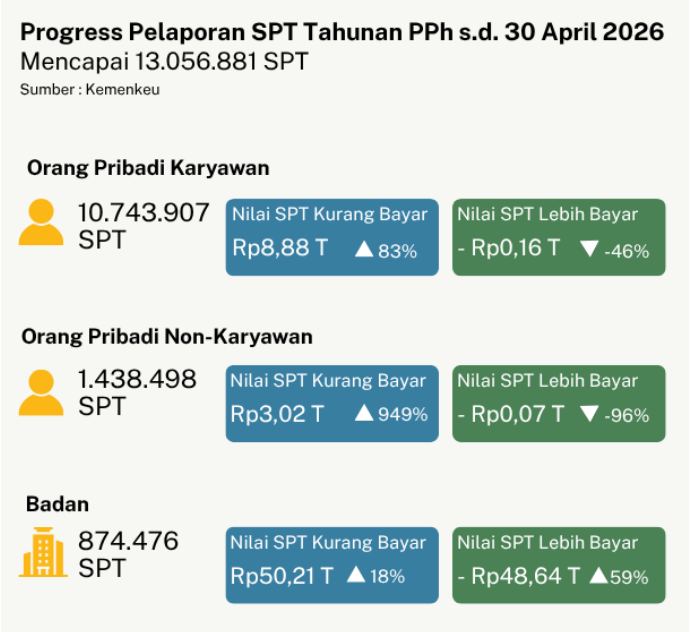
Hingga 31 Maret 2026, APBN menunjukkan kinerja yang tetap solid. Pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun (18,2% target), sementara belanja negara mencapai Rp815,0 triliun (21,2% pagu). Dengan capaian tersebut, defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB—masih berada dalam jalur yang terkendali dan sesuai dengan desain fiskal tahun 2026.

Defisit Triwulan I 2026 yang relatif lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu merupakan bagian dari pergeseran paradigma belanja Pemerintah yang selama ini terkonsentrasi di Triwulan IV. Akselerasi belanja Pemerintah di Triwulan I menunjukkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 yang sangat solid di 5,61%. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di koridor disiplin fiskal.

Penerimaan Pajak Tumbuh Seiring Momentum Ekonomi yang Terjaga

Kinerja pendapatan negara terjaga, terutama dari sisi perpajakan. Penerimaan pajak neto Triwulan I 2026 mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7% (yoy), sementara secara bruto tercatat Rp518,2 triliun, tumbuh 9,9% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM serta PPh, sejalan dengan konsumsi dan aktivitas usaha yang tumbuh solid pada Triwulan I 2026.

Selain itu, implementasi Coretax mulai menunjukkan dampak positif terhadap administrasi perpajakan. Hingga 30 April 2026, sistem ini telah memproses 13,1 juta SPT Tahunan PPh secara efektif — mengintegrasikan proses perpajakan *end-to-end* mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pembayaran dalam satu sistem. Dari sisi pengawasan, sistem yang lebih terintegrasi membuat pemantauan pajak lebih terukur dan tepat sasaran, tercermin dari kenaikan nilai SPT Kurang Bayar pada kelompok orang pribadi karyawan, orang pribadi non-karyawan, dan badan. Sementara itu, jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT Badan diperpanjang hingga 31 Mei 2026, sehingga potensi penerimaan dari segmen ini masih akan terus bergerak dalam beberapa pekan ke depan.

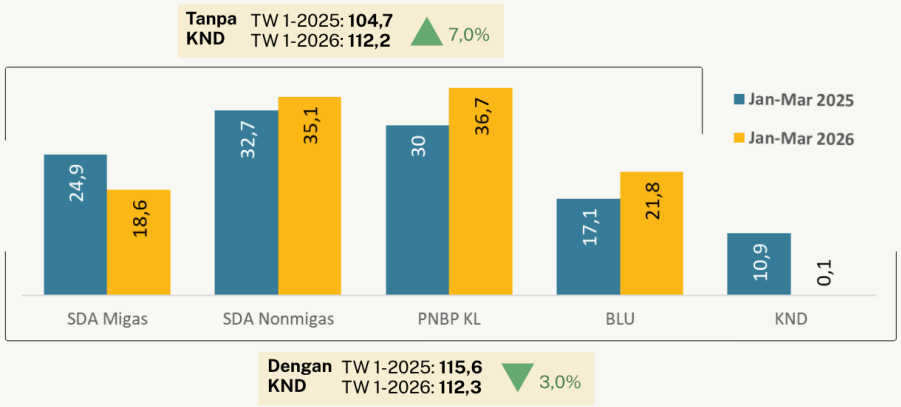


Empat sektor utama menjadi penopang pertumbuhan pajak. Perdagangan (neto) tumbuh 59,9% (yoy), didorong perdagangan BBM dan meningkatnya belanja *online*. Industri pengolahan juga tumbuh 11,5% (yoy), ditopang subsektor tembakau dan kimia. Sementara itu, keuangan dan asuransi tumbuh 7,6% (yoy), sedangkan pertambangan membalik tren kontraksi panjang dengan pertumbuhan 6,3% (yoy), didukung perbaikan sektor migas.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar Rp67,9 triliun. Meskipun secara kumulatif masih mengalami kontraksi, laju penurunannya semakin melandai. Realisasi bea masuk mencapai Rp11,5 triliun, tumbuh 0,9% (yoy) didorong peningkatan bea masuk dari komoditas kebutuhan proyek dan pembangunan, mengindikasikan aktivitas investasi dan konstruksi yang terus berjalan. Sementara itu, bea keluar dan cukai masing-masing mencapai Rp5,4 triliun dan Rp51,0 triliun, masih mencatat kontraksi namun mulai membaik sejalan dengan penguatan harga CPO dan peningkatan produksi rokok di Januari–Februari.

Pengawasan kepabeanan juga terus diperkuat. Penindakan rokok ilegal meningkat 26,7% menjadi 3.851 kali, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan melonjak 66,4% menjadi 422 juta batang. Penindakan narkotika telah dilaksanakan sebanyak 325 kali dengan barang bukti mencapai 1,27 ton. Pengawasan yang lebih ketat ini tidak hanya menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang patuh, tetapi juga melindungi ruang penerimaan negara dari kebocoran.

Realisasi PNBP s.d. Triwulan I 2026 (Rp Triliun)
Tumbuh 7,0% (yoy) - Tanpa KND (Dividen BUMN)
Sumber : Kementerian Keuangan



Realisasi PNBP mencapai Rp112,1 triliun (24,4% APBN), tumbuh 7,0% (yoy) tanpa memperhitungkan dividen BUMN. Hal ini disebabkan tidak berulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang tahun lalu mencapai Rp10,9 triliun, seiring transformasi BUMN dan pembentukan Danantara.

PNBP SDA Nonmigas tumbuh 7,1% (yoy), ditopang kenaikan harga komoditas seperti emas (+73% yoy), tembaga (+40% yoy) dan nikel (+9% yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, PNBP K/L dan BLU juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing tumbuh 22,0% (yoy) dan 27,3% (yoy), menggambarkan perbaikan layanan publik dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan negara.


Foto: Fahry Samalewa

Belanja Negara Ekspansif dan Responsif Menjaga Daya Tahan Ekonomi

Belanja negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun, tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini dilakukan untuk memastikan dampaknya segera dirasakan masyarakat, tetap tepat sasaran, dan responsif terhadap tekanan yang sedang berlangsung.

Belanja Pemerintah Pusat didorong oleh peningkatan belanja K/L dan non-K/L. Belanja K/L mencapai Rp281,2 triliun (18,6% pagu), tumbuh 43,4% (yoy), antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai meningkat seiring penyaluran THR ASN/TNI/Polri dan pensiunan serta penambahan ASN baru. Belanja barang didominasi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp54,4 triliun, penyaluran Dana BOS, insentif biodiesel, pelayanan kesehatan UPT, dan stabilisasi harga pangan. Belanja modal dipercepat untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi.

Sementara belanja bansos sedikit turun, yang mencerminkan perbaikan kualitas data penerima manfaat. Program perlindungan sosial tetap menjangkau masyarakat luas, antara lain melalui PBI JKN sebanyak 96,7 juta peserta, PKH 9,7 juta KPM, Kartu Sembako 17,5 juta KPM, dan KIP Kuliah 773,3 ribu mahasiswa.

Di sisi non-K/L, belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp118,7 triliun (26,6% pagu), menggambarkan peran penting APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga stabilitas konsumsi domestik di tengah volatilitas. Ketika harga energi global meningkat, kebijakan subsidi memastikan harga energi di Indonesia tetap terjangkau, sehingga tekanan inflasi dapat diredam dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, volume penyaluran barang subsidi mengalami peningkatan, antara lain BBM tumbuh 9,2% (yoy), LPG 3 kg 3,8% (yoy), listrik 2,4% (yoy), dan pupuk 13,6% (yoy) — menunjukkan jangkauan program yang semakin luas.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun. Sejalan dengan percepatan belanja negara, penyaluran TKD juga meningkat lebih cepat, dengan realisasi mencapai 29,5% dari alokasi APBN (Realisasi Maret 2025 mencapai 23,8% pagu). Percepatan ini didorong realisasi DBH, DAU, DAK Nonfisik, dan Dana Otsus.

Selain itu, realisasi TKD juga dipengaruhi penyaluran tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera yang mencapai Rp7,48 triliun (di luar Dana Otsus Aceh Tahap II yang masih menunggu rekomendasi Gubernur Aceh).


Foto: Kantor Staf Presiden

Sementara sebagian TKD lainnya masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Belanja Ketahanan Pangan dan MBG untuk Investasi Masa Depan

Belanja negara juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas jangka menengah. Hingga akhir Maret 2026, realisasinya meningkat signifikan mencapai Rp53,7 triliun (25,5% pagu), mencerminkan percepatan intervensi Pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Peran BULOG juga turut diperkuat melalui serapan gabah hingga 2,6 juta ton, beras 12,0 ribu ton, dan jagung 1,8 juta ton. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan nasional, tetapi juga memperkuat stabilitas harga, serta menjaga kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil panen domestik.

Program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hingga Triwulan I 2026, realisasi program ini telah mencapai Rp55,3 triliun dengan cakupan penerima manfaat mencapai 61,8 juta orang melalui 26.362 SPPG.

Selain memberikan perlindungan konsumsi bagi kelompok rentan, program ini juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi daerah.

Keseimbangan Fiskal yang Terjaga dengan Defisit Terkendali dan Pembiayaan Terukur

Peran APBN sebagai *shock absorber* juga tercermin dari kemampuannya menjaga keseimbangan fiskal. Defisit tetap berada pada level aman (Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB), menunjukkan bahwa ruang fiskal masih dikelola dengan hati-hati. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia untuk menghadapi risiko ke depan.

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp257,4 triliun (37,3% dari target), terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang negatif Rp1,3 triliun. Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara pruden dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

Pembiayaan Utang yang Pruden dan Efisien

Realisasi pembiayaan utang hingga Maret 2026 mencapai 31,1% target APBN, menunjukkan bahwa pemenuhan pembiayaan tetap berada dalam jalur yang terjaga. Pengelolaan utang dilakukan secara pruden dengan mempertimbangkan likuiditas kas Pemerintah dan dinamika pasar keuangan melalui pendekatan *active cash* and *debt management.*

Pemerintah terus memanfaatkan momentum pasar yang stabil untuk menjaga biaya tetap efisien. Sinyal kepercayaan investor terlihat dari kinerja pasar perdana SBN yang solid dengan *incoming bid* dan rata-rata *bid-to-cover ratio* lelang SBN relatif stabil di tengah tekanan aliran modal ke *emerging markets* akibat eskalasi perang. *Bid-to cover ratio* menunjukkan tren kenaikan di bulan April didukung *net inflow* di pasar SBN, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental pasar keuangan domestik.

Kepercayaan investor ritel dan internasional juga terjaga baik. Sukuk Ritel SR024 berhasil menghimpun dana sebesar Rp17,49 triliun, dengan 25,73% investor baru dan 39,88% merupakan investor yang melakukan reinvestasi dari seri sebelumnya. SR024 juga berhasil menjangkau investor di seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan semakin luasnya basis investor domestik.

Di pasar internasional, Samurai Bond berhasil diterbitkan senilai JPY172,1 miliar, termasuk di dalamnya dua seri Blue Bonds. Capaian tersebut merefleksikan kepercayaan investor Jepang terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas fiskal serta wujud komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

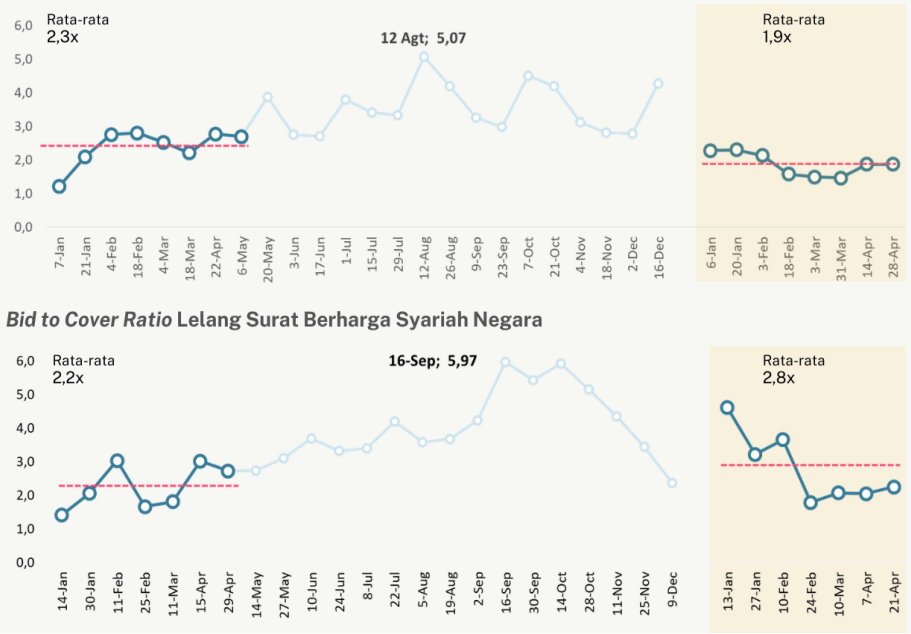
Pembiayaan Non-Utang: Menopang Stabilitas dan Agenda Prioritas

Pembiayaan APBN tidak hanya bertumpu pada penerbitan utang. Di sisi non-utang, pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk menopang stabilitas fiskal sekaligus mendorong agenda prioritas pembangunan.

Melalui pengelolaan kas dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pemerintah terus menjaga ketersediaan likuiditas pada level yang optimal. SAL sebagai

Lelang SBN Berlangsung Cukup Baik

Rata-rata *bid to cover ratio* relatif stabil, bahkan membaik



bantalan kas memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola timing pembiayaan sehingga dapat menekan *cost of fund* sekaligus mengelola risiko operasional APBN di tengah dinamika pasar keuangan global.

Selain itu, pembiayaan investasi juga terakselerasi untuk menjangkau sektor-sektor strategis, yaitu:

- Rp22,73 triliun untuk menguatkan peran BULOG guna meningkatkan kesejahteraan petani, menstabilkan harga, dan memastikan ketersediaan pangan dalam negeri.
- Rp5,58 triliun untuk LMAN, mendukung implementasi PSN di berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan akses terhadap layanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Rp1 triliun untuk *pooling fund* penanggulangan bencana melalui BPDLH, sebagai dukungan kesiapan menghadapi risiko iklim dan bencana alam.

APBN sebagai Jangkar di Tengah Ketidakpastian

Di tengah berlanjutnya tekanan dan risiko global, APBN terus dioptimalkan peranannya untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja yang ekspansif, melindungi daya beli melalui subsidi dan menjaga kepercayaan melalui pengelolaan fiskal yang kredibel.

Hingga Triwulan I 2026, pendapatan tetap tumbuh dan digunakan untuk belanja prioritas demi mengerek pertumbuhan dan meredam dampak gejolak. Defisit APBN tetap terkendali dan terus dijaga kredibilitasnya.Bauran sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta efektivitas strategi diplomasi ekonomi turut berhasil menjaga stabilitas serta mempertahankan kepercayaan investor dan memastikan pembiayaan negara tetap efisien.

Kekuatan APBN tidak hanya terletak pada angka-angkanya, namun juga pada kemampuannya beradaptasi — menjaga stabilitas di tengah gejolak, mendorong pertumbuhan ketika peluang terbuka, dan memastikan arah pembangunan tetap terjaga.

NEWSLETTER

APBN KiTA

KINERJA DAN FAKTA

Newsletter ini merupakan versi ringkas dari Paparan Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KiTa. Publik dapat mengakses diseminasi APBN KiTa lainnya, yaitu Bahan Paparan dan Buku APBN KiTa melalui QR Code yang tersedia di halaman ini.

Temukan versi APBN KiTa selengkapnya di sini.

Narahubung media:

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
+62813-1000-4134

Hidayat Amir
Direktur Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Kementerian Keuangan
sekretariat.alco@kemenkeu.go.id
+62821-2484-9458

Edisi VII | April 2026 disusun oleh:
Aulia Wahyu M. (Penulis), Chairul Adi (Editor),
I Gede Yuddy Hendranata (Penanggung Jawab) dan Aditya W. (Cover)
Tim Sekretariat ALCO Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF